

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Teori Hubungan antara Agama dan Negara.....	12
2. Teori Muatan Peraturan Perundang-Undangan.....	17
3. Teori Otonomi Daerah	21
F. Metode Penelitian.....	23

1. Fokus Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Metode Pendekatan yang Digunakan.....	26
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	27
G. Kerangka Skripsi.....	28

BAB II EKSISTENSI PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARI'AH DALAM TATA HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah	30
B. Sejarah Legislasi Peraturan Daerah dan Sejarah Munculnya Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah.....	34
1. Sejarah Legislasi Peraturan Daerah.....	34
2. Sejarah Munculnya Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah.....	44
C. Jenis-Jenis Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah.....	50
D. Eksistensi Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dalam Tata Hukum Indonesia	56
1. Sistem Hukum Indonesia	56
2. Hukum Islam Sebagai Sistem Hukum	61
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	67
4. Kedudukan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah dalam Hierarki	75

BAB III PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARI'AH DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH

A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.....	78
1. Pengertian Otonomi Daerah	78
2. Bentuk Dasar Otonomi Daerah	89
3. Asas-Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah	96
a. Asas Desentralisasi	97
b. Asas Dekonsentrasi	100
c. Asas <i>Medebewind</i> (Tugas Pembantuan)	101
B. Otonomi Daerah Dalam Sebuah Negara Kesatuan.....	103
1. Bentuk Dasar Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan	103
2. Kewenangan Daerah Dalam Negara Kesatuan	106
C. Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dalam Bingkai Otonomi Daerah	111

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA.....	123
----------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hierarki Pemerintahan Kolonial Jepang.....	38
Gambar 2. Struktur Pemerintahan Pada Masa Pasca Kolonial.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemerintahan Pada Masa Kolonial	36
Tabel 2. Proses Otonomi Daerah di Indonesia.....	43
Tabel 3. Daftar Perda Bernuansa Syari'ah Islam di Berbagai Daerah	56
Tabel 4. Sumber Hukum Materill dan Formal.....	63
Tabel 5. Perkembangan Hierarki Tata Urutan Perundang-undangan	71